



2025 LAKIP BPKAD KOTA CIMAHI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Segenap Puji dan Syukur senantiasa tercurah kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita masih dapat berkarya di Kota Cimahi ini.

LKIP merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat penilaian kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

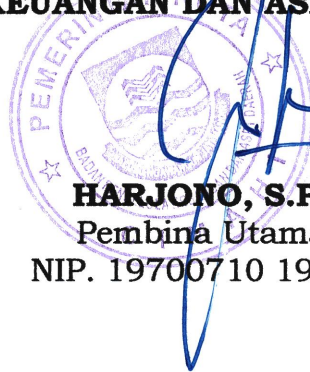
Dokumen yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh khususnya dalam pencapaian kinerja Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sepanjang tahun 2025.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait .

Akhirnya semoga Allah SWT, selalu memberikan kemudahan terhadap semua kegiatan yang kita laksanakan, Aamin.

Cimahi, 6 Januari 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**



HARJONO, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Kota Cimahi adalah “Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya”. Sebagai bagian pemerintah kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah sebagai organisasi yang menunjang urusan keuangan di Pemerintah Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjalankan visi Wali Kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Peran Kepala BPKAD sebagai pembantu Walikota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Dalam upaya sinkronisasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota maka BPKAD menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra BPKAD disusun untuk Tahun 2023-2026 dengan memuat satu tujuan yaitu teroptimalisasi kualitas tata kelola keuangan daerah yang didukung oleh sasaran strategis berupa optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dengan tolak ukur pencapaiannya dari tiga indikator pendukung yaitu: (1) Penyusunan APBD yang Tepat Waktu, (2) Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan (3) Rasio Utilisasi Aset.

Selama tahun anggaran 2025, BPKAD didukung penyediaan anggaran Pendapatan sebesar Rp. 850.333.405.358,00, yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp.829.505.274.784,00 atau 97,55%, serta didukung dengan anggaran Belanja sebesar Rp.27.906.860.344,00 yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp.16.540.806.042,00, belanja modal sebesar Rp.721.602.000,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10.644.452.302,00 dengan pencapaian realisasi sebesar

Rp.19.145.696.144,00 atau 68,61% yang terdiri dari Rp.13.384.019.524,00 atau 80,92% untuk belanja operasional, Rp.675.300.700,00 untuk belanja modal atau 93,58% dan 5.086.375.920,00 atau 47,78% untuk belanja tidak terduga.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Beberapa inovasi telah dilakukan oleh BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsi nya, serta pada tahun 2025 fokus utama pencapaian kinerja khususnya dalam penataan utilisasi aset daerah sudah dilakukan berbagai upaya seperti :

1. Penggunaan aplikasi Persegi untuk pencatatan persediaan dan Grafis dalam penatausahaan aset tetap;
2. Pengamanan dan penyelesaian aset bermasalah;
3. Optimalisasi pemanfaatan aset.

Beberapa hal di atas dilakukan untuk menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan BMD, legalisasi kepemilikan aset, mempercepat ketersediaan dan meningkatkan kualitas data keuangan dan aset serta pemanfaatan aset guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Cimahi.

Mengacu kepada hasil nilai LKIP BPKAD tahun 2024 yang memperoleh nilai 86,40 dengan predikat A, ada beberapa perbaikan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan yang didasarkan kepada LHE Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nomor : 700.02/119/Sekre tanggal 11 April 2025 dari Inspektorat Kota Cimahi. Beberapa rekomendasi perbaikan tersebut agar BPKAD menyajikan realisasi capaian indikator sasaran pada Monev Renaksi sehingga dapat dilakukan perbandingan kesesuaian dengan capaian kinerja yang terdapat pada LKIP dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi pada Setda Kota Cimahi dalam membangun sistem Aplikasi Penilaian Mandiri AKIP internal agar hasil lebih efektif, efisien dan berkualitas.

Rekomendasi tersebut menjadi salah satu fokus dari pelaksanaan tugas di BPKAD yang dilaksanakan di tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Tahun 2025 menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun. Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra

dan Perjanjian Kinerja BPKAD di tahun 2025, untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 111,38 %.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan sasaran BPKAD. Persentase capaian kinerja diukur dari sasaran strategis BPKAD Tahun 2025 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

**Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran Kinerja
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	75%	82,63 %	110,17 %
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	61	83,24	136,45%
Rata - Rata Capaian						111,65 %

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi.....	2
1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi	2
1.3.2 Isu Strategis.....	6
1.4 Sistematika Penyajian.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi	11
2.2 Rencana Strategis BPKAD Tahun 2023-2026.....	11
2.3 Penetapan Tujuan dan Sasaran	12
2.4 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	73
3.1 Akuntabilitas Kinerja	73
3.2 Pengukuran Kinerja.....	75
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	90
3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	93
3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu	92
3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra.....	98
3.3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	99
3.3.5 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	101
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	102
3.4.1 Belanja Operasional.....	102
3.4.2 Belanja Modal	103
3.4.3 Belanja Tidak Terduga.....	103
3.5 Evaluasi Kinerja.....	103
BAB IV PENUTUP	115
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pelaporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2025 tingkat pencapaiannya sebesar 102,5%. Hal ini didukung oleh pencapaian atas empat indikator yaitu penyusunan APBD yang tepat waktu (100%), prosentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan (100%), utilisasi aset mencapai 112,24 % dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD 83,24.

Mengacu kepada hasil yang diuraikan di atas, maka pada tahun 2025 BPKAD berusaha mempertahankan kinerja yang sudah ada dan terus meningkatkan kualitas pencapaian kinerja di keempat indikator terutama pada pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Cimahi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKAD dalam memenuhi target akhir rencana strategis rasio utilisasi sebesar 75% yaitu :

1. Percepatan penyusunan Peraturan Wali Kota Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Penggunaan aplikasi dalam proses penatausahaan dan inventarisasi aset;
3. Pengamanan dan penyelesaian aset bermasalah;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas yang strategis dalam menjalankan fungsi penunjang di bidang keuangan daerah.

Hal ini karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan pengelola keuangan daerah yang berwenang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam

rangka melaksanakan tujuan dan mencapai sasaran BPKAD sekaligus menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit bidang di lingkungan BPKAD, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja BPKAD.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi

1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang di bidang keuangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Dalam menjalankan fungsinya, BPKAD berperan untuk :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Cimahi didukung oleh 35 PNS dan 2 orang P3K.

Tabel 1.1

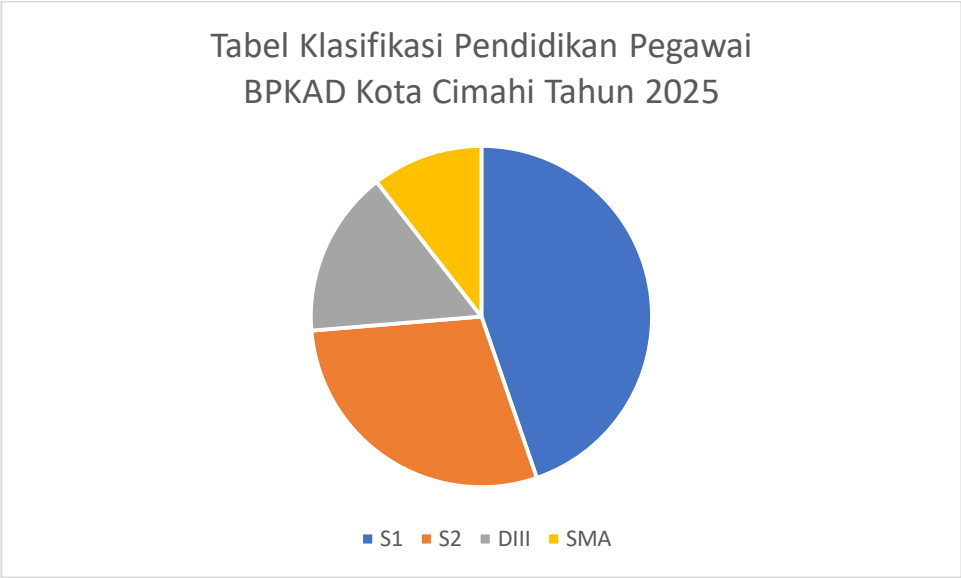
Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV / c	1 Orang
Pembina Tk I	IV / b	1 Orang
Pembina	IV / a	5 Orang
Penata Tk I	III / d	7 Orang
Penata	III / c	9 Orang
Penata Muda Tk I	III / b	4 Orang
Penata Muda	III / a	5 Orang
Pengatur Tk I	II / d	3 Orang
PPPK	09	4 Orang
PPPK	07	1 Orang
PPPK	05	3 Orang
Jumlah		43 Orang

Pegawai BPKAD dalam mencapai kinerja yang dibutuhkan diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan.

Gambar 1.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.2

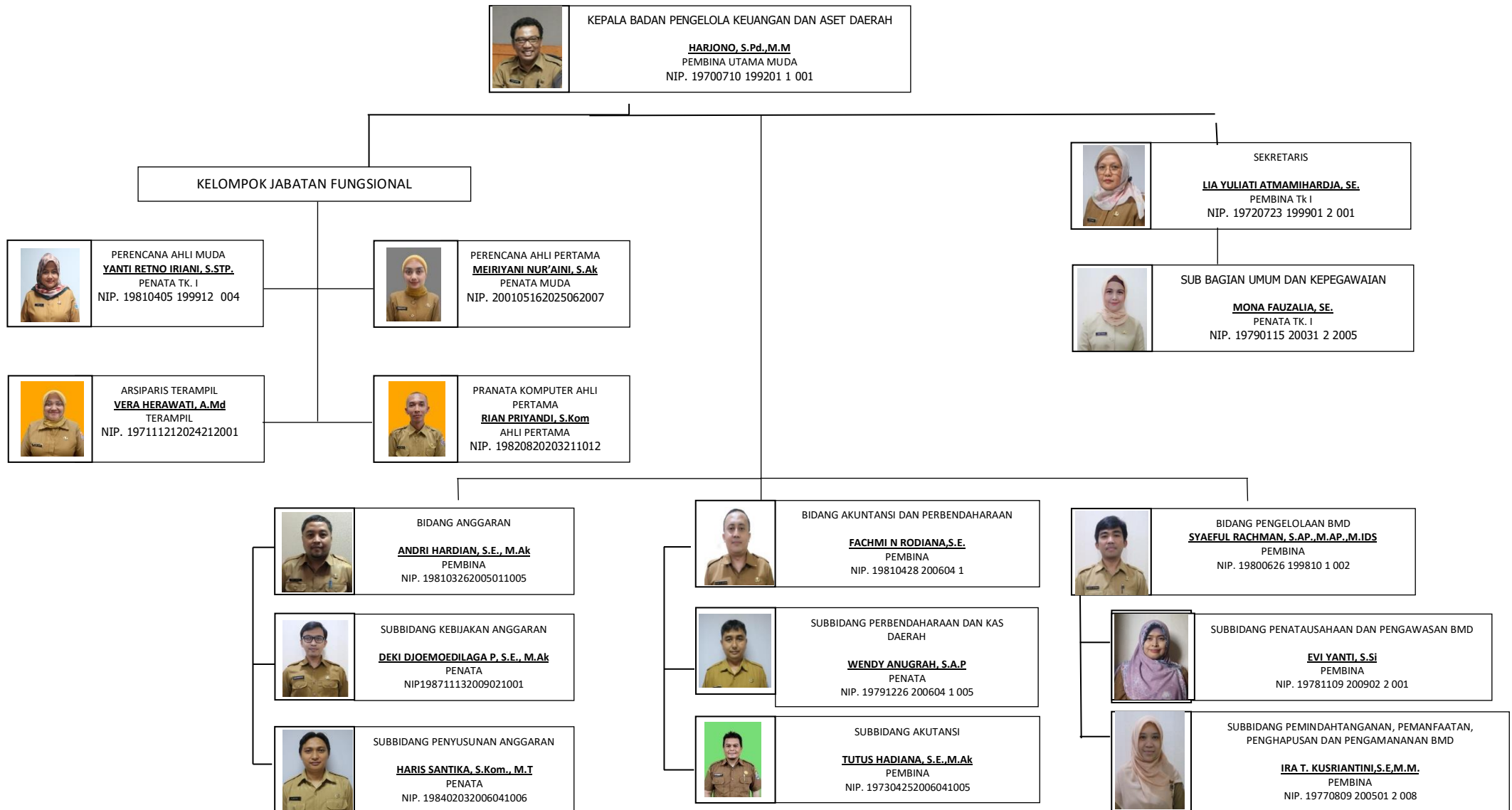
Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Magister / S2	11 Orang
Sarjana / S1	20 Orang
Diploma /D3	6 Orang
SLTA / Sederajat	6 Orang
Jumlah	43 Orang

Berdasarkan tabel 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S1 yaitu sebanyak 20 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan S-2 sebanyak 11 orang serta D-III sebanyak 6 orang, dan golongan SMA/SMK sebanyak 6 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 31 orang atau 72,1 % dari total pegawai yang dimiliki BPKAD pada tahun 2025. Tetapi dilihat dari jumlah pegawai masih dinilai kurang dilihat dari susunan analisis jabatan yang ada.

Selain pegawai dalam pelaksanaan tugas BPKAD Kota Cimahi membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan berupa peralatan dan mesin berkondisi baik yang dimiliki.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi

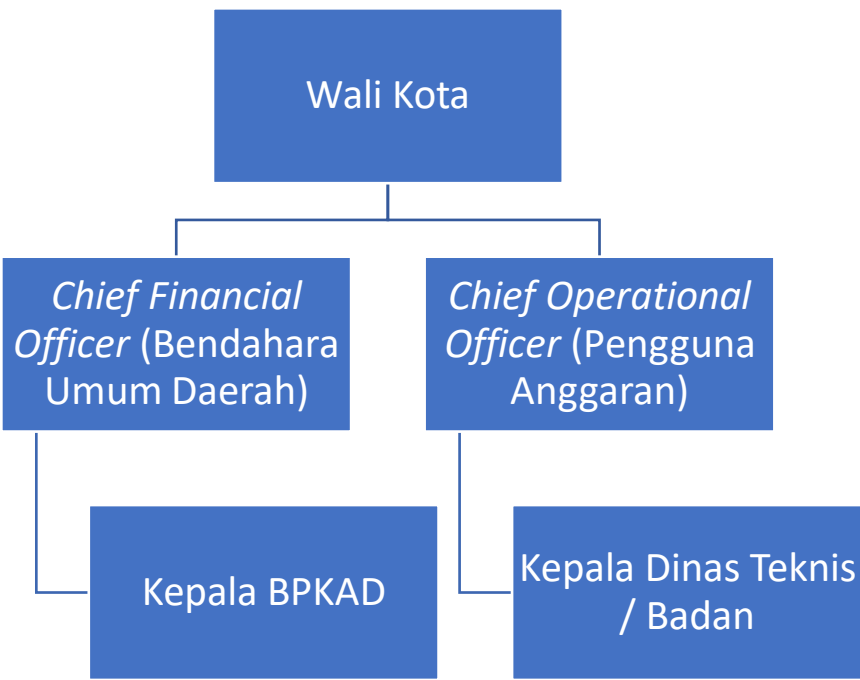


1.3.2 ISU STRATEGIS

BPKAD mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memberi kuasa kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kepala BPKAD sebagai pembantu Wali Kota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu urusan tertentu pemerintahan.

Gambar 1.3 Peran Strategis BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah



Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola keuangan daerah, Kepala BPKAD mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Peran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Adapun Misi yang tercantum dalam RPJPD untuk periode 2005-2025 yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Terkait dengan misi, urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah tercakup ke dalam misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

RPD Tahun 2023-2026 Kota Cimahi memuat 7 (Tujuh) Tujuan Kota dan 28 (Dua puluh Delapan) Sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (impact).

Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana;

Dalam RPD 2023-2026 Kota Cimahi BPKAD masuk kedalam tujuan kota nomor 3 meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan sasaran Opini BPK.

Selain itu dalam menjalankan peran strategisnya BPKAD Kota Cimahi menyajikan analisis mengenai permasalahan dan isu-isu Strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja BPKAD. Isu-isu strategis BPKAD untuk tahun 2025, yaitu :

1. Peningkatan Pemahaman terkait pengelolaan keuangan (Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan);
2. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan;
3. Peningkatan Pelayanan dan Konsultasi;
4. Implementasi Kajian Pemanfaatan Aset.

Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis diatas adalah :

1. Dilaksanakannya Pelatihan, Pembinaan dan Sosialisasi terkait peraturan pengelolaan keuangan terbaru;
2. Adanya rekonsiliasi dengan pemilahan data yang tepat;
3. Adanya pembinaan dan pelayanan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD;
4. Pembentukan UPTD Pemanfaatan Aset.

Kemudian dalam rangka mempertahankan Opini WTP Pemeriksaan BPK RI 12 kali berturut-turut, BPKAD memiliki tantangan berupa pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan SIPD RI yang baru sehingga pada tahun 2025 mengharuskan menggunakan SIPD RI meskipun masih dalam proses pengembangan. Upaya yang dilakukan dengan meminta pendampingan kepada tenaga ahli SIPD Pusdatin Kemendagri.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Cimahi dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKIP BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, Pada Bab ini diuraikan hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun BPKAD Tahun 2025;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025 dan menjelaskan Akuntabilitas Keuangan BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2025;

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2025.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Proses perencanaan BPKAD haruslah searah dan sesuai dengan tujuan dan arah pembangunan dari Kota Cimahi baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025. RPJP Kota Cimahi berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota dalam menentukan visi, misi, dan program yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perencanaan Daerah Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Cimahi pada awal tahun 2025 merupakan indikator kinerja yang mengaju kepada RPD 2023-2026 yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 pada Tahun 2024 terdiri dari 1 sasaran dan 3 indikator.

IKU	
Berdasarkan Perwal Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026	
Sasaran Strategis	IKU
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penetapan APBD Tepat Waktu
	2. Presentase Laporan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
	3. Rasio Utilisasi Aset
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD

2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, BPKAD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengemban visi dan misi yang tercantum pada RPD.

Visi Kota Cimahi yaitu “Cimahi Kota Cerdas”. Dengan penjelasan bahwa:

Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari

- **Creative** yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
- **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
- **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
- **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun,
- **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta
- **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

BPKAD menjalankan visi Wali kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

2.2 Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah, BPKAD yang dibentuk pada 31 Desember 2015 telah menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 – 2026. Pada dasarnya penyusunan Renstra BPKAD memperhatikan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang didalamnya terdapat Lima Misi Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah beserta 9 program prioritas yang menjadi unggulan, dimana BPKAD mendukung misi kedua yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

2.3 Penetapan Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi ditetapkan di RPJMD Kota Cimahi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2023.

Tujuan BPKAD merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi Walikota Cimahi. Sedangkan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut tujuan serta sasaran strategis BPKAD :

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;

Sasaran : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang di break down per tahun. Penetapan indikator kinerja Sasaran Strategis menggunakan kriteria SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable*, (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian). Demikian pula dengan target indikator sasaran strategis.

Penentuan besaran target ditetapkan berdasarkan harapan stakeholder, atau melihat kondisi internal dan eksternal. Selain itu penetapan target dilakukan melalui pembahasan bersama dengan seluruh jajaran pimpinan BPKAD. Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja BPKAD Tahun 2023 – 2026 adalah :

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah	Optimalnya tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penetapan APBD secara tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bidang Perencanaan Anggaran
			2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

			3. Rasio Utilisasi Aset	60 %	70 %	72 %	73, 5 %	75 %	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	-	60	60, 5	61	61, 5	Sekretariat

Selain keterkaitan tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja dalam pencapaian target BPKAD tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa kerjasama baik internal antar bidang maupun eksternal dari perangkat daerah. Oleh karena itu crosscutting dalam pencapaian target BPKAD dapat dilihat pada :

Tabel 2.2
Crosscutting Kinerja BPKAD

No	Target Kinerja	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	
			Internal BPKAD	Eksternal
1	Penetapan APBD Tepat Waktu	Penyusunan KUA-PPAS menunggu RKPD ditetapkan	Sub bidang Kebijakan Anggaran dan Sub bidang Penyusunan Anggaran	Bappelitbangda
2	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penyusunan laporan keuangan tingkat kota yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan Perangkat Daerah	Sub bidang Akuntansi dan Sub bidang Perbendaharaan	Seluruh Perangkat Daerah
3	Rasio Utilisasi Aset	Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub bidang Penatausahaan dan Pengawasan, Sub bidang Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pengamanan BMD	Seluruh Perangkat Daerah

			dan Sub bidang Akuntansi	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	Pemenuhan Indikator Reformasi Birokrasi	Sekretariat dan Bidang pada BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan.

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan BPKAD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
		Rasio Utilisasi Aset Daerah	75%

2.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	61
----	--	--	----

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaanya.

Renja BPKAD selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU BPKAD yang selanjutnya ditetapkan perjanjian kinerja, seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja BPKAD. Adapun indikator yang ada pada perjanjian kinerja BPKAD diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama BPKAD.

**Tabel RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						39.274.170.500,00							49.251.041.500,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						39.274.170.500,00								49.251.041.500,00			
	5	02				KEUANGAN						39.274.170.500,00									49.251.041.500,00		
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat	81.65 Nilai Anilai 50.6Nilai			76,00 Nilai 81.35 Nilai	12.593.584.750,00							81.65 Nilai A nilai	20.201.041.500,00			

							at Daerah				A nilai						50.6 Nilai		
	5	02	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun sesuai ketentuan	-			100 Persen	78.823.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD	-	31.845.000,00
	5	02	01	20001	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	68.535.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		23.115.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	10.288.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		8.730.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2		Administ rasi Keuanga n Perangk at Daerah	Present ase Adminis trasi Keuanga n yang terlaksa na	-			100 Persen	10.649.126.650,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD	-	19.209.600.683,00	
	5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjang an ASN				38 Orang/bulan	10.641.694.650,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		19.202.158.683,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		2	1	.	0						1	4.440.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	SISA LEBIH PERHIT UNGA N ANGG ARAN TAHUN SEBELU MNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		4.440.000,00	BADAN PENGELO A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		2	1	.	0						1	2.992.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	SISA LEBIH PERHIT UNGA N ANGG ARAN TAHUN	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		3.002.000,00	BADAN PENGELO A KEUANGA N DAN ASET DAERAH

						SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD						SEBELUMNYA						
	5	02	01	203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Hasil Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	61.057.000,00		-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD	-	53.485.000,00	

	5	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		2	1	.	0					4	61.057.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD		53.485.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	0	0	2	0	Administ rasi Kepega waian Perangk at Daerah	Persentase Pegawai yang Terfasili tasi Pembinaan	-		100	98.240.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan	Seluruh Pegawai BPKAD	-	10.000.000,00		

															n, akuntabel, responsif, independ en dan kesetaraa n				
	5	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
		2	1	.	0														
				5	2														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengk apan				1 Paket	22.800.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	SISA LEBIH PERHIT UNGA N ANGG ARAN TAHUN SEBELU MNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkat an kualitas tatakelola pemerinta han yang transpara n, akuntabel, responsif, independ en dan kesetaraa n	Seluruh Pegawai BPKAD		0,00	BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
		2	1	.	0														

				05	10															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	75.440.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD		10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	377.601.300,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD	-	529.833.000,00	
	5	02	01	20	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

				06	02															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	49.043.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		159.184.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2006	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	53.718.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		53.722.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2006	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan				1 Paket	28.370.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	Inovasi Pelayanan Publik dan	Seluruh Pegawai BPKAD		27.069.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGA

							dan Pengan- daan yang Disediak- an						tan, Semua Kel/Desa	N ANGG ARAN TAHUN SEBELU MNYA		Penataan Daerah.					N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 1	2 . 0 0 6	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyele- nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD				12 Lapora n	165.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHIT UNGA N ANGG ARAN TAHUN SEBELU MNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		165.000.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH	
	5	0 2	0 1	2 . 0 0 6	0 0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
							Jumlah Dokume n Penatau sahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokum en	64.119.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHIT UNGA N ANGG ARAN TAHUN SEBELU MNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		85.707.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH	

	5	0	0	2	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
		2	1	.	0					1	17.350.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		39.150.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	0	0	2	.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	1.042.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan	Seluruh Pegawai BPKAD	-	129.261.817,00	

[illegible]

				07	06															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	200.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2007	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	342.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		129.261.817,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	20.		Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Penyediaan Jasa	-			100 Persen	20.516.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan	Seluruh Pegawai BPKAD	-	20.516.000,00	

				08		Urusan Pemerin tahan Daerah	Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah								Penataan Daerah.				
	5	02	01	2008	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an				12 Lapora n	5.400.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	SISA LEBIH PERHIT UNGA N ANGG ARAN TAHUN SEBELU MNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		5.400.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2008	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor				2 Lapora n	15.116.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua	SISA LEBIH PERHIT UNGA N ANGG ARAN TAHUN	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		15.116.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH

							yang Disedi ak an						Kel/Des a	SEBELU MNYA						
	5	0 2	0 1	2 . 0 9		Pemeli araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Persent ase Pemeli araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah	-			100 Persen	266.220.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD	-	216.500.000,00	
	5	0 2	0 1	2 . 0 9	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendara an Peroran gan Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan yang Dipeliha ra dan dibayark an					12 Unit	213.390.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	SISA LEBIH PERHIT UNGA N ANGG ARAN TAHUN SEBELU MNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		216.500.000,00	BADAN PENGELO L A KEUANGA N DAN ASET DAERAH

							Pajaknya													
	5	02	01	2009	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	52.830.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan	100 persen			100 persen	23.369.322.800,00						100 persen	27.650.000.000,00	

[illegible]

				0 1	0 1															
							Jumlah Dokume n KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokum en	190.956.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		88.599.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 0 1	0 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokume n Perubah an KUA dan Perubah an PPAS yang Disusun				2 Dokum en	76.963.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		76.963.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 0 1	0 0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
							Jumlah RKA- SKPD yang Diverifik asi				30 Dokum en	349.857.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		232.660.200,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Jumlah Perubah an DPA- SKPD yang Diverifik asi				30 Dokum en	20.307.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		21.711.700,00	BADAN PENGELO A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 0 1	0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
							Jumlah Peratur an Daerah tentang APBD dan Peratur an Kepala Daerah tentang Penjaba ran APBD				2 Dokum en	97.529.200,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		100.128.600,00	BADAN PENGELO A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 0 1	0 0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	152.847.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		99.192.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	200019	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	245.913.650,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		142.609.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	200011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														

						Jumlah Dokume n Hasil Koordin asi Perenca naan Anggara n Belanja Daerah				3 Dokum en	76.176.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		76.176.400,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 1 1	0 0 1 2	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan													
						Jumlah Dokume n Hasil Koordin asi Perenca naan Anggara n Pembiay aan				1 Dokum en	53.076.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		53.439.300,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 1 1	0 0 1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Orang yang Mengik uti				120 Orang	82.291.350,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan,	LAIN- LAIN PAD	-	Inovasi Pelayanan Publik dan	Seluruh SKPD		69.546.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN

							Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Semua Kel/Desa	YANG SAH		Penataan Daerah.				ASET DAERAH
	5	02	02	202		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perbendaharaan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu	-			100 Persen	539.752.600,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD	-	325.000.000,00
	5	02	02	200021	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelol				12 Dokumen	52.610.200,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		56.613.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

							Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordin asi dalam rangka Penyusu nan Laporan Realisasi Penerima an dan Pengelu aran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksa naan Pemung utan/Pe motong an dan Penyeto ran Perhitun gan Fihak Ketiga (PFK)												
	5	0 2	0 2	2 .	0 0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait													

				02	09															
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				120 Dokumen	29.673.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		33.673.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2012	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan				1 Dokumen	49.995.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

	5	0	0	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Keterseediaan Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	-			100 Persen	774.998.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD	-	800.000.000,00	
	5	0	0	2	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				22 Dokumen	34.677.650,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PADYANGSAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		34.677.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	0	0	2	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Lapora n	392.438.300,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		417.438.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokum en	71.823.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		71.823.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Kabupat en/Kota dan Rancang an Peratur an Kepala Daerah tentang Penjaba ran Pertang gungjaw aban Pelaksa naan APBD Kabupat en/Kota												
	5	0 2	0 2	2 . 0 3	0 0 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													
						Jumlah Dokume n Hasil Koordin asi, Sinkroni sasi, dan Penyele saian Tuntuta n Perbend aharaan				1 Dokum en	36.441.900,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		36.442.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH

							dan Tuntuta n Kerugia n Daerah													
	5	0 2	0 2	2 . 0 3	0 0 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Kebijaka n dan Pandua n Teknis Operasi onal Penyele nggaraa n Akuntan si Pemerin tah Daerah				1 Dokum en	69.308.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		69.308.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 3	0 0 1 0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Sistem dan Prosedu r Akuntan				1 Dokum en	61.810.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		61.810.200,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN

							si dan Pelapor an Keuanga n Pemerin tah Daerah							Kel/Des a								ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 3	0 1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Orang yang Mengik uti Pembin aan Akuntan si, Pelapor an dan Pertang gungjaw aban Pemerin tah Kabupat en/Kota				30 Orang	53.268.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		53.268.000,00	BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET DAERAH		
	5	0 2	0 2	2 . 0 3	0 1 2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																

							Jumlah BLUD Kabupat en/Kota yang Dibina				15 Lemba ga	28.746.950,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		28.747.200,00	BADAN PENGELO A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 3	0 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Laporan Statistik Keuanga n Pemerin tahan Daerah pada Pemerin tah Kabupat en/Kota				1 Lapora n	26.484.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		26.484.800,00	BADAN PENGELO A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 4		Penunja ng Urusan Kewena ngan Pengelol aan Keuanga n Daerah	Persent ase Laporan Urusan Penunja ng Pengelol aan Keuanga n Daerah	-			100 Persen	20.175.000.000,00			-	-	BPKAD dan SKPD Pengam pu	-	25.000.000.000,00	

							yang disusun tepat waktu													
	5	0 2	0 2	2 . 0 4	0 0 4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencana naan dan Pelaksa naan Pembay aran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjama n Pemerin tah Daerah				2 Lapora n	175.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	-	BPKAD dan SKPD Pengam pu		0,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 2	2 . 0 4	0 0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	20.000.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	BPKAD dan SKPD Pengam pu		25.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	205		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Bulan Keterak sesan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-		12 Bulan	199.999.900,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD	-	250.000.000,00	
	5	02	02	200052	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemelih				1 Dokumen	199.999.900,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

							araan Sistem Informa si Pemerin tah Daerah Bidang Keuanga n Daerah						Kel/Des a							ASET DAERAH
3	5	0 2	0 3			PROGRA M PENGEL OLAN BARANG MILIK DAERAH	Persent ase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapk an tepat waktu	100 perse n			100 persen	3.311.262.950,00						100 perse n	1.400.000.000,00	
	5	0 2	0 3	2 . 0 1		Pengelol aan Barang Milik Daerah	Persent ase Laporan Hasil Pengelol aan BMD (siklus BMD)	-			100 persen	3.311.262.950,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD	-	1.400.000.000,00	
	5	0 2	0 3	2 . 0	0	Penyusunan Standar Harga														

				01	01															
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen	276.637.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		190.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2001	003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	152.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2001	004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	60.500.000,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Penatau sahaan Barang Milik Daerah				10 Lapora n	922.585.350,00	-	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		75.000.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Inventar isasi (LHI) Barang Milik Daerah				3 Lapora n	61.757.300,00	-	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		150.000.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengam anan Barang				50 Lapora n	750.000.000,00	-	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		400.000.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN

							Milik Daerah													ASET DAERAH
	5	0 2	0 3	2 .0 1	0 0 0 8	Penilaian Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	190.000.000,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 3	2 .0 1	0 0 0 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Penge				4 Laporan	42.200.200,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

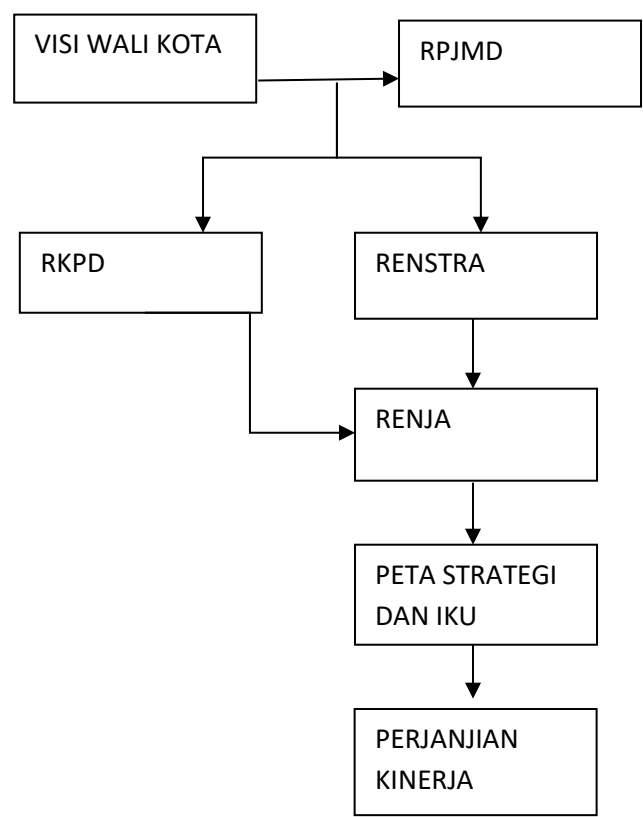
							dalian Pengelol aan Barang Milik Daerah												ASET DAERAH	
	5	0 2	0 3	2 . 0 1	0 0 1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Dokume n Hasil Optimali sasi Penggu naan, Pemanf aatan, Pemind ahtanga nan, Pemusn ahan, dan Pengha pusan Barang Milik Daerah				10 Dokum en	250.000.000,00	-	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		185.000.000,00	BADAN PENGELOL A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 3	2 . 0 1	0 0 1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

							Jumlah Laporan Hasil Rekonsil iasi dalam rangka Penyusu nan Laporan Barang Milik Daerah				5 Lapora n	50.402.800,00	-	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		15.000.000,00	BADAN PENGELO A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	5	0 2	0 3	2 . 0 1	0 1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengik uti Pembin aan Pengelol aan Barang Milik Daerah Pemerin tah Kabupat en/Kota				247 Orang	555.179.600,00	-	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		100.000.000,00	BADAN PENGELO A KEUANGA N DAN ASET DAERAH
	J U M L A H											39.274.170.500,00							49.251.041.500,00	

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja terdapat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya, berikut merupakan alur penyusunan dokumen rencana kerja dan perjanjian kinerja BPKAD dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 2.1
Alur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja



Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Cimahi. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya. Matriks perjanjian kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2025 dijelaskan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan BPKAD Tahun 2025.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penyusunan APBD yang Tepat Waktu 2. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 3. Rasio Utilisasi Aset	Tepat Waktu 100 % 75 %
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	61

Perjanjian kinerja dibuat setelah RKA dan DPA ditetapkan karena di dalam perjanjian kinerja tercantum anggaran dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan digunakan dalam pencapaian target. Rencana Kerja Anggaran (RKA) telah diselaraskan dengan rencana kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Tercantum 3 Program 14 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan yang telah selaras dari rencana kerja, RKA dan DPA pada tahun 2025.

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai BPKAD Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025. Untuk mencapai target-target tersebut, maka disusun program dan anggaran BPKAD Kota Cimahi Tahun 2025 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Program dan Anggaran BPKAD Tahun 2025.

Program	Anggaran (Rp)	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.934.525.642	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13.727.268.302	100%

Program Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.245.066.400	100%
Jumlah	27.906.860.344	100%

Selain itu sebagai tindaklanjut dari program dan kegiatan yang disusun, BPKAD Kota Cimahi juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun. Rencana aksi memuat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPKAD dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditentukan baik dari segi program, kegiatan hingga subkegiatan. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan pertriwulan oleh Kepala BPKAD melalui rapat kerja internal per triwulan. Berikut rencana aksi BPKAD Tahun 2025 :

TABEL 2.7
Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN		SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET				KET
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	I	II	III	IV	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	I	II	III	IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN		I	II	III	IV	
																Kepmen 050-5889 Th 2021						
1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11	12	13				14
	MENINGKATKAN KUALITAS DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BPKAD		61 Nilai			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		(A) 72 Nilai			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4		2	2	8 dokumen (RKA, RKA-P, DPA,DPPA, Cascading Renstra, Renja Perubahan, Forum OPD, Laporan MR BPKAD)
								Nilai IKM Perangkat Daerah			82 Nilai				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	3	4	3	2 dokumen (LKIP dan SKM) dan 12 Laporan Monev Kinerja -Honorarium Pengelola Kegiatan
															Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	37	37	37	37	35 orang PNS dan 2 orang P3K (14 bulan Gaji) (12 bulan TPP)
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1				1 dokumen (Laporan Tahunan)
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan			1		1 dokumen (Laporan Keuangan Semesteran)

[illegible]

													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	19	19	9	66 unit Pemeliharaan (Mesin FC, Meja, Kursi, AC, Laptop, Printer)
	OPTIMALISASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	1. Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu			100%										Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen			2		2 Dokumen
															Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen			2		2 Dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	dokumen			30		30 RKA SKPD
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	10	20	30		60 Dokumen (RKA-P)
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	dokumen	30				30 dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	dokumen				30	30 dokumen

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan pertriwulan dievaluasi dan dibahas terkait kendala-kendala dan hambatan baik dari internal maupun eksternal serta solusi bersama dari setiap permasalahan.

BPKAD pada tahun 2025 telah menyusun LKIP tahun 2024 yang telah dievaluasi oleh Inspektorat Kota Cimahi. Hasil evaluasi LKIP BPKAD tahun 2024 oleh Inspektorat Kota Cimahi, diperoleh nilai 86,40 dengan predikat A. Hasil evaluasi LKIP dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Komponen Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi		
		Bobot	Hasil Nilai	Persen (%)
A.	Perencanaan Kinerja	30	26,40	88,00
B.	Pengukuran Kinerja	30	27,00	90,00
C.	Pelaporan Kinerja	15	12,00	80,00
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00	84,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	86,40	85,50

Mengacu kepada hasil review oleh Inspektorat, maka nilai terendah berada pada aspek pelaporan kinerja yaitu hanya 12,00 dari kemungkinan total 15 atas poin tersebut, Adapun catatan yang perlu diperbaiki atas poin tersebut yaitu menyajikan realisasi capaian indikator sasaran pada Monev Renaksi sehingga dapat dilakukan perbandingan kesesuaian dengan capaian kinerja, oleh sebab itu hal ini menjadi faktor yang BPKAD perbaiki pada Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2023 - 2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kinerja Tahunan 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

Beberapa acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

B. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). BPKAD telah menetapkan IKU sebagai ukuran kinerja secara formal, hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Kualitas IKU sangat bergantung kepada besarnya *coverage* IKU terhadap Sasaran Strategis, semakin besar *coverage* IKU terhadap Sasaran strategis, semakin bernilai persisi, sebaliknya semakin kecil *coverage* IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis semakin bersifat

aktivitas. Berikut keterkaitan IKU BPKAD dengan sasaran strategis dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dari Utama	Ket
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penetapan APBD tepat Waktu	Ukuran Penetapan APBD dilihat dari Rangkaian Tanggal Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Ukuran Persentase Laporan Keuangan dilihat dari Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan perangkat daerah kepada BPKAD secara tepat waktu dan sesuai SAP.
			Rasio Utilisasi Aset	Rasio Utilisasi Aset diukur berdasarkan jumlah nilai rata-rata capaian kinerja Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.
		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	Ukuran dilihat dari pemenuhan nilai dan eviden indikator dari Reformasi Birokrasi

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan jawaban dari perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja yang dilakukan dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam pengukuran kinerja dibutuhkan supervisi pimpinan sebagai controlling dari pelaksanaan kegiatan. Evaluasi kinerja BPKAD dilaksanakan secara berkala per 3 bulan. Kepala BPKAD memimpin rapat evaluasi dengan melihat rencana aksi dan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan melihat capaian kinerja yang dicapai baik pada tahun jalan ataupun terhadap renstra BPKAD dan juga terkait kendala-kendala yang dapat menghambat capaian kinerja.

Sebagai amanat ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, BPKAD menyusun laporan kinerja tahunan 2025 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025 yang disepakati, dan menyampaikannya kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan kinerja dimaksud, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPKAD;
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Kinerja Pemerintah Kota Cimahi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Cimahi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran capaian kinerja BPKAD Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target IKU yang tercantum dalam perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- X > 85 : Sangat Berhasil
- 70 < X < 85 : Berhasil
- 55 < X < 70 : Cukup Berhasil
- X < 55 : Tidak Berhasil

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja BPKAD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	75%	82,63 %	110,17 %
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	61	83,24	136,45%
Rata - Rata Capaian						111,65 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya 111,65 % atau bermakna sangat berhasil, dalam pencapaian sasaran strategis ini BPKAD mengidentifikasikan 4 (empat) indikator kinerja yang masing-masing pencapaiannya sebagai tercantum pada tabel di atas. Berikut penjabaran hasil dari masing-masing indikatornya :

1. Penyusunan APBD yang tepat waktu

Dalam proses penyusunan APBD, BPKAD memiliki 1 kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah dengan 12 sub kegiatan yang memiliki anggaran sebesar Rp1.616.864.800 dengan capaian realisasi sebesar Rp1.453.879.386 atau 89,92% dan capaian fisik sebesar 100% yang dimana keseluruhan sub kegiatan

dilaksanakan dalam rangka penyusunan APBD Kota Cimahi tepat waktu.



APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 105 ayat 3c disebutkan bahwa Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama (1) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Pada prinsipnya kinerja penyusunan APBD selama tahun 2025 adalah proses penyusunan APBD untuk Tahun 2026 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2026, maka berikut merupakan gambaran tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disusun oleh BPKAD :

Tabel 3.3 Tahapan Penyusunan APBD Kota Cimahi

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	KU.02/ND.308/BPKAD	29 Juli 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
2	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	910/3094/BPKAD	30 Juli 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
3	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada Gubernur untuk dilakukan penilaian KUA-PPAS dengan KEM PPKF	910/3095/BPKAD	30 Juli 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)

4	Penerimaan dan tindak lanjut hasil penilaian KUA dan PPAS dengan KEM PPKF	-	-	Sesuai/Tidak Sesuai, (paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima)
5	Kesepakatan antara kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS	900/27-NK/2025	9 September 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
		900/08/NK/IX/2025 900/28-NK/2025 900/09/NK/IX/2025	9 September 2025	
6	Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD	27 Tahun 2025	10 September 2025	Tidak Sesuai, paling lambat minggu III bulan Agustus
7	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD	1. KU.02/50/BPKAD/2025 2. KU.02/70/BPKAD/2025	1. 11 September 2025 2. 16-17 Oktober 2025	paling lambat minggu III bulan Agustus
8	RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib direvisi oleh APIP daerah	KU.02/773/Bid.Anggaran	10 September 2025	paling lambat minggu III bulan Agustus
9	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD		11 September 2025	paling lambat minggu III bulan Agustus
10	Penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD	KU.02/51/BPKAD/2025	12 September 2025	Sesuai/Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
11	Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	170/11/BA/XI/2025	26 November 2025	Sesuai/Tidak Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA berkenaan)
12	Menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD	KU.02/114/BPKAD/2025	1 Desember 2025	Sesuai/Tidak Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) kerja setelah persetujuan bersama)
13	Hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD	KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 903/Kep.835-BPKAD/2025	15 Desember 2025	paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima oleh Menteri/gubernur
14	Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD	Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cimahi Nomor 22/Kep.Pim.DPRD/XII/2025	27 Desember 2025	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
15	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri/Gubernur	Surat Sekretaris Daerah Kota Cimahi Nomor 188.342/5415/Huk	29 Desember 2025	3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
16	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2025	30 Desember 2025	paling lambat akhir Desember (31 Desember)
17	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri/Gubernur		6 Januari 2026	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa selama penyusunan APBD tahun anggaran 2026, BPKAD yang dalam hal tugas ini berada di bawah wewenang bidang perencanaan anggaran dan aset yang membantu Kepala BPKAD untuk mencapai kinerja penetapan APBD tepat waktu. Batas maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir serta pada poin ke 16 dalam hal penetapan APBD yang dapat

ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025 atau sebelum tahun anggaran APBD itu dimulai pada tanggal 1 Januari 2026, sehingga pada indikator ini pencapaiannya telah 100% sesuai target yang ditetapkan pada IKU serta perjanjian kinerja BPKAD.

2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pencapaian target persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP, BPKAD memiliki 3 kegiatan yaitu Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terdiri 7 sub kegiatan serta Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari 9 sub kegiatan dan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah serta memiliki total anggaran sebesar Rp. 1.366.701.800 dengan capaian realisasi Rp.1.265.772.185 atau 92,62% serta capaian realisasi fisik 100% yang dimana kedua kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai target.



Kerjasama dari kedua sub bidang perbendaharaan dan akuntansi merupakan 2 komponen yang tidak terpisahkan. Sub bidang Perbendaharaan mengawasi agar pelaksanaan penatausahaan agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan sub bidang akuntansi menerima hasil penatausahaan dan dilakukan pencatatan

jurnal-jurnal transaksi dan dilaporkan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, sub bidang perbendaharaan dibantu dalam penatausahaan keuangan daerah menggunakan SIPD sebagai sistem informasi yang dibangun oleh Kemendagri yang dimana alur proses penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020. Sub Bidang Perbendaharaan bertugas memverifikasi berkas yang masuk terkait kesesuaian bukti-bukti transaksi. Begitu juga Sub Bid Akuntansi dalam pencatatan jurnal dibantu menggunakan SIPD Aklap dimana data yang diperoleh merupakan data transfer dari SIPD Penatausahaan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum serta Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Unit yang mempunyai fungsi bendahara umum di Kota Cimahi adalah BPKAD selaku SKPKD, sehingga para perangkat daerah hanya diwajibkan menyampaikan lima buah laporan yang selanjutnya harus disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut daftar Perangkat Daerah yang telah menyajikan Laporan Keuangan selama Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.4 Daftar Perangkat Daerah yang Menyajikan Laporan Keuangan

No.	Nama Perangkat Daerah	Penyajian Laporan Keuangan
1.	Dinas Pendidikan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
2.	Dinas Kesehatan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
3.	RSUD Cibabat	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
5.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
8.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
10.	Dinas Tenaga Kerja	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
11.	Dinas Pangan dan Pertanian	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
14.	Dinas Perhubungan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
15.	Dinas Komunikasi, informatika,	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
16.	Dinas Arsip Daerah	
17.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
19.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Sesuai SAP 71 Tahun 2010

20.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
22.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
24.	Sekretariat Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
25.	Sekretariat DPRD	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
26.	Inspektorat Kota	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
27.	Kecamatan Cimahi Utara	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
28.	Kecamatan Cimahi Tengah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
29.	Kecamatan Cimahi Selatan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
30.	Kantor Kesatuan Bangsa	Sesuai SAP 71 Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat dari 30 perangkat daerah di Kota Cimahi telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2024 sesuai dengan SAP 71 tahun 2010, BPKAD yang dalam hal tugas ini berada di bawah wewenang bidang akuntansi dan perbendaharaan yang membantu Kepala BPKAD untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kota Cimahi dalam pencapaian kinerja.

3. Rasio Utilisasi Aset

Dalam pencapaian target Rasio Utilisasi Aset, BPKAD memiliki 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri 11 sub kegiatan memiliki total anggaran sebesar Rp. 2.245.066.400 dengan capaian realisasi Rp. 1.891.144.497 atau 84,24% serta capaian realisasi fisik 100% yang dimana kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai target.



Utilisasi pada umumnya mengacu pada proses pendayagunaan sumberdaya. Aset sebagai salah satu sumber daya yang harus benar-benar diutilisasi dengan optimal. Proses utilisasi aset harus dilakukan berdasarkan hasil analisis *highest and best use principle*. Berdasarkan prinsip ini, aset dapat optimal apabila seluruh kapasitas yang dimiliki difungsikan secara optimal sehingga mampu memenuhi asas legal, aspek kelayakan fisik, aspek kelayakan finansial dan produktivitas maksimal.

Untuk memastikan utilisasi atas aset daerah berjalan dengan optimal maka ditetapkanlah IKU Rasio Utilisasi Aset terhadap total aset tetap. Objek utilisasi pada indikator ini meliputi aset-aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan data pada LKPD, aset tetap selalu memiliki porsi terbesar dengan nilai pertumbuhan yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, penggunaan indikator ini berfungsi untuk memastikan aset daerah, terutama aset tetap, benar-benar diberdayakan dengan optimal, sehingga berdampak pada adanya nilai tambah serta menghilangkan *oppurtunity loss* atas aset tersebut. Ruang lingkup utilisasi aset yang diukur pada indikator ini sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jenis Utilisasi Aset Tetap

No	Jenis Utilisasi	Rincian Utiliasasi	Objek Pengukuran
1	Pemanfaatan	A.Sewa	Nilai Aset yang disewakan
		B.Kerja sama Pemanfaatan	Nilai Aset yang di KSP kan
		C.Bangun Guna Serah (BGS)	Nilai Aset yang BGS kan
		D.Bangun Serah Guna (BSG)	Nilai Aset yang BSG kan
		E. Pinjam Pakai	Nilai Aset dipinjam pakaikan
2.	Penetapan Status Penggunaan	A. Penetapan Status penggunaan dari perolehan APBD atau perolehan lainnya yang sah	Nilai Aset yang ditetapkan status penggunaannya
		B. Penetapan status penggunaannya karena hibah masuk	Nilai Aset yang ditetapkan status penggunaanya karena hibah masuk
		C. Penetapan aset untuk penyertaan modal pemerintah	Nilai Aset yang dikonversi sebagai penyertaan modal
3.	Hibah	Hibah atas aset untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusaiaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Aset yang dihibahkan
4.	Tukar Menukar	Tukar Menukar Aset	Nilai aset baru hasil tukar menukar

Target IKU tahun 2025 ditetapkan sebesar 75%, hal ini berarti 75% dari total aset tetap dan aset tetap lainnya yang dimiliki daerah harus sudah memiliki status utilisasi. Total aset tetap didasarkan pada nilai aset tetap pada laporan Barang Milik Daerah, yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan.

Tabel 3.6
Daftar Aset Tetap Per SKPD Tahun 2025 (Unaudited)

No	Perangkat Daerah	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	69.653.646.086,00	96.141.612.427,3600	248.865.945.633,31	698.984.566,00	55.679.704.668,69	1.122.252.011,00	472.162.145.392,36
2	DINAS KESEHATAN	8.011.042.001,00	56.124.950.571,5600	76.401.133.967,00	3.463.821.573,00	61.713.000,00	508.591.082,00	144.571.252.194,56
3	RSUD CIBABAT	28.362.300.000,00	292.971.044.224,2400	139.759.431.428,20	7.337.924.739,00	12.025.600,00	-	468.442.725.991,44
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	653.380.240.191,60	12.934.724.955,0000	86.522.077.623,00	697.140.884.592,74	534.085.000,00	6.178.614.704,00	1.456.690.627.066,34
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	279.222.708.735,00	16.017.213.721,7600	45.928.924.754,00	177.006.443.662,00	15.522.391.815,00	61.482.845,00	533.759.165.532,76
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	22.349.596.698,3400	1.930.254.531,00	-	97.119.000,00	-	24.376.970.229,34
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	4.949.173.618,0000	-	-	9.800.000,00	-	4.958.973.618,00
8	DP3AP2KB	-	4.430.365.653,3900	645.033.000,00	-	3.999.380,62	8.113.902,00	5.087.511.936,01
9	DINAS SOSIAL	40.302.500,00	2.657.210.149,5400	2.713.747.355,00	-	-	-	5.411.260.004,54
10	DINAS TENAGA KERJA	-	1.798.146.998,0000	-	-	5.790.000,00	-	1.803.936.998,00
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	14.252.840.000,00	5.685.831.085,4100	12.746.674.602,10	4.149.277.550,00	9.000.000,00	-	36.843.623.237,51
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24.729.801.960,00	55.489.550.294,7600	16.062.286.610,00	5.672.713.527,00	8.800.000,00	-	101.963.152.391,76
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	9.397.156.350,0000	41.036.000,00	28.865.000,00	48.674.800,00	-	9.515.732.150,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	-	44.155.339.398,00	14.101.060.100,00	89.259.844.838,00	3.765.000,00	-	147.520.009.336,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	11.504.149.250,0000	2.203.635.075,00	220.487.300,00	-	-	13.928.271.625,00
16	DINAS ARSIP DAERAH	1.551.831.050,00	2.556.676.582,0000	-	-	1.959.597.206,00	-	6.068.104.838,00
17	DISDAGKOPERIN	9.272.750.000,00	15.429.442.392,8100	167.518.643.566,00	1.574.060.725,00	364.050.825,00	17.853.418,00	194.176.800.926,81
18	DPMPSTP	-	36.562.533.655,0000	89.581.290.443,05	-	4.440.000,00	-	126.148.264.098,05
19	DISBUDPARPORA	35.223.186.450,00	2.410.824.526,0000	26.340.312.219,00	268.853.035,00	245.025.000,00	274.093.481,00	64.762.294.711,00
20	BAPPERIDA	-	4.272.767.703,5900	-	-	9.800.000,00	-	4.282.567.703,59
21	BPKAD	20.054.000.000,00	15.531.385.076,0000	-	-	226.000.000,00	-	35.811.385.076,00
22	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	7.378.927.777,6600	298.259.937,00	1.107.900.000,00	91.863.000,00	-	8.876.950.714,66
23	BKPSDMD	-	2.184.470.804,00	-	-	-	-	2.184.470.804,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	196.319.715.740,00	32.927.778.465,7800	57.518.480.573,22	175.060.800,00	500.749.922,00	-	287.441.785.501,00
25	SEKRETARIAT DPRD	2.756.775.000,00	21.241.481.938,0000	14.003.972.501,00	-	2.261.194.720,00	1.535.661.551,00	41.799.085.710,00
26	INSPEKTORAT KOTA	-	2.958.461.170,0000	4.790.946.174,00	-	-	-	7.749.407.344,00
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	10.479.245.000,00	7.115.928.968,1100	7.734.617.852,00	49.558.364,00	7.792.489,00	-	25.387.142.673,11
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	10.039.095.128,00	11.255.346.075,2800	11.955.028.708,00	21.263.637,00	3.896.246,00	-	33.274.629.794,28
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	14.529.905.000,00	9.589.369.411,9400	8.472.257.223,00	189.574.684,75	9.812.492,00	-	32.790.918.811,69
30	KESBANGPOLL	-	1.121.518.618,0000	-	-	3.446.000,00	-	1.124.964.618,00
	TOTAL	1.377.879.384.841,60	809.142.978.559,5300	1.036.135.049.874,88	988.365.518.593,49	77.684.536.164,31	9.706.662.994,00	4.298.914.131.027,80

Untuk memperoleh nilai dari rasio utilisasi diperlukan perhitungan yang terdiri dari 3 indikator yaitu Penatausahaan BMD, Pemanfaatan BMD dan Pengamanan BMD. Penatausahaan BMD melihat tingkat ketepatan waktu panyampaian laporan rekonsiliasi BMD dan Penetapan Status Pengguna yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk Pemanfaatan BMD dilihat dari jumlah potensi BMD yang akan dimanfaatkan sebanyak 17 area yang telah dinilai/ appraisal terkait kelayakan lokasi dan nilai sewa dan dari keseluruhan potensi 11 lokasi telah berhasil dimanfaatkan dan menghasilkan PAD bagi Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 3.7

Daftar Potensi Pemanfatan BMD

No	Jenis Pemanfaatan	LOKASI	Harga Perolehan Aset (Rp.)			Unit Dimanfaatkan	
			Tanah	Gedung	TOTAL	Unit	checklist
1	Sewa Tanah dan Gedung	BJB Pemkot	22.377.974,21	314.472.982,22	336.850.956,42	1	✓
2	Sewa Tanah	BJB DPRD	1.418.048,55	-	1.418.048,55	1	✓
3	Sewa Tanah	TOWER DPRD	63.812.184,54	-	63.812.184,54	1	✓
4	Sewa Tanah Jalan	Jalan Kota / FO	54.208.399.840,00	-	54.208.399.840,00	108	✓
5	Sewa Gedung	Kantin Sekolah	211.224.757,14	2.560.880.793,69	2.772.105.550,83	61	✓
6	Sewa Tanah dan Gedung	GOR LKMD	467.250.000,00	260.000.000,00	727.250.000,00	1	x
7	Sewa Tanah dan Gedung	Kolam BBI	1.750.000.000,00	1.466.044.000,00	3.216.044.000,00	1	x
8	Sewa Tanah	GOR Sangkuriang	100.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	1	✓
9	Sewa Tanah	Lapangan Cibaligo	1.715.000.000,00	-	1.715.000.000,00	1	✓
10	Sewa Tanah	Lapangan Poral	1.764.000.000,00	-	1.764.000.000,00	1	x
11	Sewa Tanah	SMP PGRI	64.960.000,00	-	64.960.000,00	1	x
12	Sewa Tanah	Penimbangan Dishub	584.210.000,00	-	584.210.000,00	1	✓
13	Sewa Tanah	Warung contong Dustira	33.750.000,00	-	33.750.000,00	1	x
14	Sewa Tanah	Kapten Iskak	286.300.000,00	-	286.300.000,00	1	x
15	BOT (BGS)	Cimahi Mall	12.764.966.240,00	-	12.764.966.240,00	1	✓
16	MPP	Jl. Aruman	3.982.552.000,00	-	3.982.552.000,00	1	✓
17	Aula	Seluruh Kel/kec				1	✓
	JUMLAH		177.920.221.044,43	4.601.397.775,91	178.539.066.820,33		

Selanjutnya pengamanan BMD melihat dari persentase realisasi jumlah aset Pemerintah Kota Cimahi yang telah disertifikasi dengan melihat target dari jumlah aset yang belum tersertifikasi, dengan target 467 sertifikat telah terealisasi 361 sertifikat.

Tabel 3.8
Perhitungan Rasio Utilisasi

	INDIKATOR	TA 2024	KETERANGAN
1	PENATAUSAHAAN BMD		
	Indikator: Laporan Rekonsiliasi BMD Triwulan dan Semester dan Penetapan Status Pengguna BMD 2024	100%	
2	PEMANFAATAN BMD		
	Indikator: Potensi BMD yang akan dimanfaatkan (17 area)	178.539.066.820,33	Sewa di area Pemkot , Sewa di area Kantor DPRD , Sewa sebagian bahu jalan, BGS Cimahi Mall, Sewa area Kantor Penimbangan Dishub, Kantin Sekolah, GOR Sangkuriang, BBI, Gor LKMD, Lapangan Cibaligo, Lapangan Poral, SMP PGRI, Area di Jalan Kapten Iskak, Area di Jalan Warung Contong, Sewa di Area MPP, Sewa aula Kel/Kec)
	BMD yang telah dimanfaatkan (12 area dari target 17 area)	70,59%	Sewa Lahan dan Gedung di area Pemkot (BJB), Sewa Lahan di area Kantor DPRD (ATM BJB dan Tower Telekomunikasi), Sewa sebagian bahu jalan, BGS Cimahi Mall, Sewa area Kantor Penimbangan Dishub, Kantin Sekolah, GOR Sangkuriang, dan Aula di Kel/Kec, Lapangan Poral
3	PENGAMANAN BMD		
	Target sertifikasi (a)	467	
	Realisasi sertifikasi (b)	361	
	Proses sertifikasi (sudah masuk BPN) (c)	0	
	(b+c)/a	0,77	
	%	77,30%	
	Ratio Utilisasi aset (1+2+3)/3	0,83	
	(%)	82,63%	

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa ratio utilisasi aset Pemerintah Kota Cimahi ada pada angka 82,63% yang berarti realisasi melebihi target yang ingin dicapai sebesar 75% sesuai tercantum pada Renstra BPKAD 2023-2026.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 :

Tabel 3.8
Perbandingan antara target dan realisasi Rasio Utilisasi
Aset Tetap

Tahun Anggaran 2025			
Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
75 %	75 %	82,63 %	111,65%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran BPKAD tahun 2025 yaitu optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah di atas, diperoleh gambaran bahwa dari tiga indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, yang menghasilkan capaian

kinerja sebesar % yang berada di interval $X > 85$ atau bermakna sangat berhasil.

4. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Nilai evaluasi reformasi birokrasi (RB) adalah pengukuran capaian kemajuan, tata kelola, dan kualitas pelayanan publik kementerian/lembaga/daerah. Evaluasi ini bertujuan mengukur kinerja, integritas, dan perbaikan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi memiliki sasaran Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan birokrasi yang efektif serta efisien. Selain itu memiliki tujuan mendapatkan profil pelaksanaan RB, memastikan aksi perbaikan berkelanjutan, dan memberikan saran perbaikan untuk rencana aksi tahun berikutnya.

Nilai BPKAD untuk evaluasi tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 20205 mendapatkan nilai sebesar 83,24 dengan 2 kategori nilai yaitu RB General sebesar 56,12 dan RB Tematik sebesar 32,15. Dasar penilaian tersebut didasarkan kepada indikator-indikator penilaian yang terdiri dari :

- RB Tematik (Pengukuran Dampak): Fokus pada hasil nyata seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, percepatan prioritas aktual presiden, dan penggunaan produk dalam negeri.
- RB General (Kualitas Tata Kelola): Evaluasi komponen manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas (SAKIP), dan penguatan pengawasan.
- Komponen Hasil (Outcome):
 - Birokrasi yang bersih dan bebas korupsi (menurunnya tingkat pelanggaran/sanksi).
 - Birokrasi yang efektif dan efisien (APBN/APBD yang lebih berkualitas/akuntabel).
 - Kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat.
- Komponen Proses (Internal): Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan mandiri oleh instansi, yang kemudian divalidasi oleh evaluator.

Dalam proses penilaian dan evaluasi BPKAD selalu melihat indikator disesuaikan dengan keadaan aktual. Hal tersebut dapat menggambarkan kondisi BPKAD sehingga dapat menjadi perbaikan apabila terdapat kelemahan atau kekurangan dalam penilaian evaluasi reformasi birokrasi.



Pencapaian nilai 83,24 dengan kategori A tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi baik internal maupun eksternal. Pemahaman dari masing-masing indikator di implementasikan pada pelaksanaan kegiatan dan operasional pada BPKAD. Komitmen keseluruhan dari pegawai BPKAD terhadap indikator dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi bagian dari pedoman pelaksanaan kegiatan.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal BPKAD, selain itu penting bahwa penetapan target dilandasi faktor SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable*, (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), sehingga target bukan semata-mudah untuk di capai tapi akan dicapai dengan beberapa tantangan demi kemajuan organisasi. Pada prinsipnya Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis BPKAD 2023-2026, pada bagian ini dijelaskan beberapa

analisa sederhana mengenai beberapa perbandingan pencapaian target pada tahun ini hingga berakhirnya target akhir rencana strategis BPKAD.



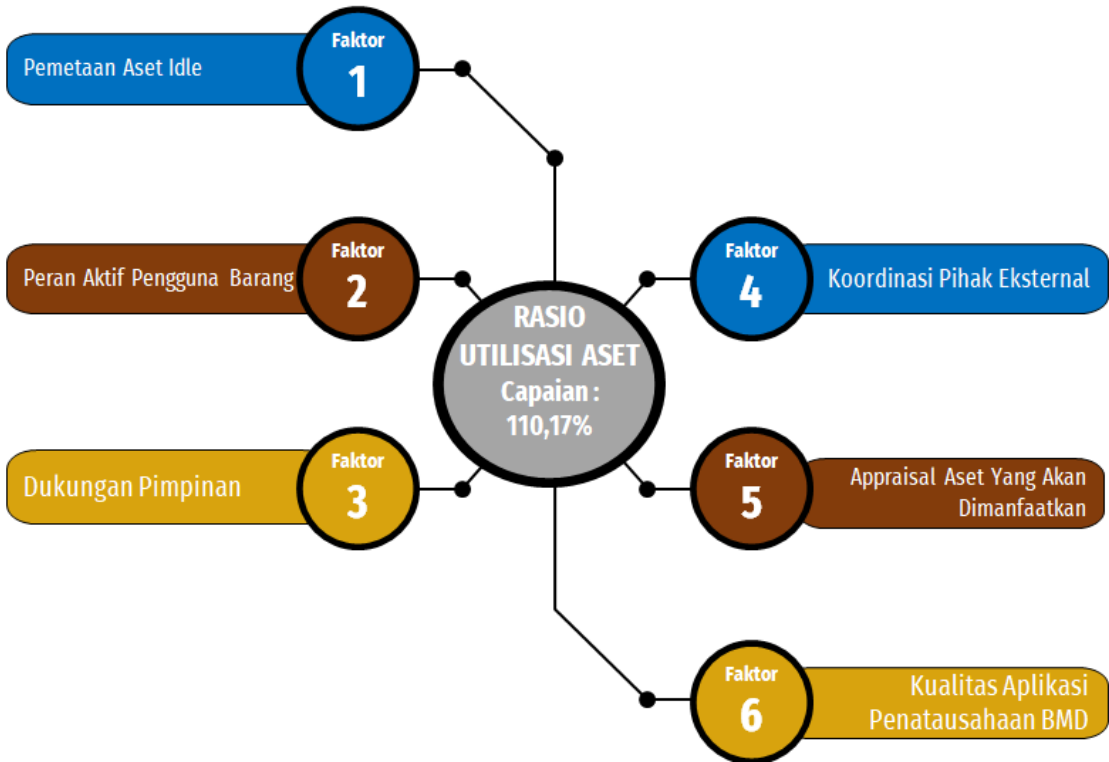
Dalam penyusunan APBD, penganggaran merupakan lanjutan dari proses Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat oleh Bappelitbangda sehingga berpengaruh kepada penyelesaian APBD. Selain itu proses selanjutnya adalah pembahasan dan kesepakatan dengan legislatif terkait isi dari APBD yang akan disusun. APBD merupakan kumpulan dari setiap kegiatan yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah. APBD juga membutuhkan reviu dari APIP untuk memastikan dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan. Sistem informasi juga sangat dibutuhkan dalam proses penginputan belanja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN

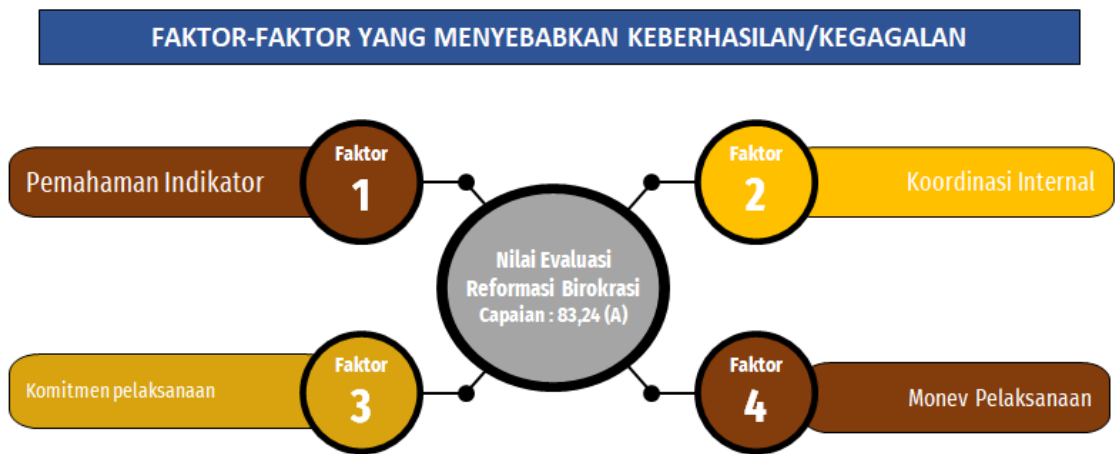


Penyusunan laporan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi SDM selaku penyusun yang harus memahami secara baik proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu data merupakan isi dari laporan keuangan yang akan disusun menjadi laporan keuangan. Komunikasi dan pengawasan memastikan bahwa isi laporan keuangan standar, dan sistematisasi sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN



Dalam pencapaian rasio utilisasi terdapat 6 faktor yang saling berhubungan, salah satunya pemetaan aset idle sebagai data utama dalam pemanfaatan aset. Selain itu peran aktif pengguna barang dan aplikasi penatausahaan BMD sebagai sarana penyusunan laporan BMD. Koordinasi eksternal dibutuhkan dalam membantu kelancaran dalam pencapaian utilisasi.



Dalam proses penilaian dan evaluasi BPKAD selalu melihat indikator disesuaikan dengan keadaan aktual. Hal tersebut dapat menggambarkan kondisi BPKAD sehingga dapat menjadi perbaikan apabila terdapat kelemahan atau kekurangan dalam penilaian evaluasi reformasi birokrasi.

Pencapaian nilai 83,24 dengan kategori A tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi baik internal maupun eksternal. Pemahaman dari masing-masing indikator di implementasikan pada pelaksanaan kegiatan dan operasional pada BPKAD. Komitmen keseluruhan dari pegawai BPKAD terhadap indikator dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi bagian dari pedoman pelaksanaan kegiatan.

3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Analisis atas capaian indikator kinerja atas sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Daftar Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100 %

3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap	75%	82,63 %	110,17 %
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	61,5	83,24	135,35%

Tabel 3.10

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan

Penjelasan Sasaran : Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah				
Penyusunan APBD yang tepat waktu	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	
Target yang ditentukan yaitu tanggal persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta Tanggal Penetapan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.	Target yang ditentukan yaitu 100 % atau seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Cimahi telah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.	Target yang ditentukan yaitu 75 % dari total aset tetap yang sesuai laporan barang milik daerah.	Target yang ditentukan berdasarkan renstra perangkat daerah yaitu 61,5	
Permasalahan : 1. Penyusunan APBD merupakan salah satu tugas Kepala	Permasalahan : 1. Pada dasarnya penyusunan Laporan Keuangan	Permasalahan : 1. Kekurangpahaman para pengurus barang dalam	Permasalahan : 1. Penggunaan aplikasi yang masih	

BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD. Permasalahan utama dalam menyusun dokumen RAPBD dan APBD adalah kecepatan perangkat daerah dalam proses sinkronisasi data, dikarenakan RAPBD merupakan kumpulan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dari seluruh perangkat daerah yang telah diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan disetujui oleh DPRD 2) Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu penilaian kinerja	perangkat daerah harus disiapkan oleh para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di masing-masing perangkat daerah, dari total 30 (tiga puluh) perangkat daerah mayoritas PPK bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi. 2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi. Pada tahun 2025, Kota Cimahi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan	menyusun dokumen laporan inventarisasi barang daerah 2. Keterbatasan SDM yang dapat menguasai teknologi dalam inventarisasi aset di Kota Cimahi 3. Keterlambatan belanja modal yang selalu dibelanjakan pada akhir tahun di hampir seluruh SKPD. 4. Beberapa faktor external seperti proses jangka waktu yang cukup lama untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota 5. Ketersediaan tim penilai barang milik daerah dari kementerian keuangan yang menunggu antrian karena keterbatasan SDM yang ada 6. Penggunaan barang yang belum dapat	pengembangan oleh Provinsi Jabar 2. Kurangnya Pemahaman terkait indikator Penilaian
---	---	--	---

pemerintah daerah dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi. Pada tahun 2024, Kota Cimahi telah menetapkan APBD secara tepat waktu. 3. Keterlambatan Penetapan RKPD 4. Keterlambatan Penetapan Pedoman Umum Penyusunan APBD.	LKPD Tahun Anggaran 2025, sehingga pada tahun ini prestasi tersebut harus tetap dipertahankan. 3. SIPD Penatausahaan dan Aklap yang masih dalam pengembangan.	memaksimalkan potensi pemanfaatan asetnya.	
Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan predikat penyusunan APBD secara tepat waktu : 1. Dalam upaya percepatan penyusunan Rancangan APBD, maka BPKAD menggunakan strategi komunikasi dan koordinasi secara intens dengan	Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan para perangkat daerah dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan : 1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi aplikasi keuangan dalam penyusunan laporan	Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan aset di Pemerintah Kota Cimahi : 1. Mengadakan kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi aset daerah yang disusun mandiri oleh BPKAD sesuai peraturan perundang-undangan 2. Pelatihan dan pendampingan	Upaya yang dilakukan : 1. Koordinasi secara intensif dengan Bagian Organisasi selaku pengampu penyusunan LAKIP Kota Cimahi 2. Peningkatan pemahaman indikator melalui pelatihan

sifat menjemput bola ataupun permasalahan ke masing-masing perangkat daerah 2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi aplikasi keuangan dalam konsolidasi penyusunan RAPBD hingga APBD 3. Komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak penyusun RKPD Komunikasi dan koordinasi dengan Kemendagri	keuangan, sehingga banyak proses yang dapat diotomatiskan, yang sebelumnya telah terverifikasi penggunaan sistem tersebut oleh Bidang Akuntansi di BPKAD 2. Mengadakan Pelatihan SIPD Penatausahaan dan Aklap 3. Membuka pelayanan konsultasi terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	kepada Perangkat Daerah dalam penggunaan aplikasi 3. Menerbitkan surat edaran terkait belanja di akhir tahun 4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal 5. Sosialisasi berkala terkait pemanfaatan BMD	
--	---	--	--

3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun Lalu

Terdapat perbedaan sasaran serta tolak ukur indikator kinerja BPKAD pada tahun 2020-2024, hal ini dapat tergambar ke dalam bagan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

	Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan												
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	%	50	60	70	72	73,5	66,5	66,7	99,33	71,83	82,5	100%
4.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	nilai	-	-	60	60,5	61	-	-	82,66	81,22	83,24	100%

Mengacu kepada tabel di atas, pencapaian target kinerja dari BPKAD selama 5 tahun selalu mencapai target. Pencapaian target tersebut tidak lepas dari peran Perangkat Daerah yang telah mengumpulkan data ataupun laporan yang menunjang capaian kinerja BPKAD. Pembinaan, koordinasi, konsultasi, pelatihan dan penyusunan SOP atau Sistem dan prosedur merupakan beberapa bentuk cara dari BPKAD memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah.

3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Analisis atas capaian indikator kinerja terhadap target akhir pencapaian sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12

Daftar Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2025	Capaian Tahun-N Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai	%	100	100	100 %

	Standar Akuntansi Pemerintahan				
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	%	82,63 %	75 %	110,17 %
4	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	%	61	83,24	136,45%

Berdasarkan data di atas dapat tergambar bahwa pencapaian tahun 2024 ini, dari 4 (empat indikator) yang mendukung sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, ketiga indikator telah tercapai sesuai target. Realisasi pencapaian akhir target pada indikator penyusunan APBD yang tepat waktu dan presentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan rasio utilisasi aset pada akhir tahun dalam renstra telah tercapai serta nilai evaluasi reformasi birokrasi .

3.3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya BPKAD selama tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.13

Daftar Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan BMD	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat waktu (100)	89,92%	10,08%
		Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	100	93,62%	6,38%

		Akuntansi Pemerintahan			
		Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	112,24	84,24 %	15,76%
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	136,45	78,38%	21,62%

Berdasarkan tabel di atas dapat tergambar informasi bahwa dari masing-masing dari indikator di atas, memiliki dukungan anggaran dalam pencapaiannya, dari tiga indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja BPKAD, keseluruhannya memenuhi unsur efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja, berikut merupakan tabel pemetaan kegiatan yang ada di BPKAD :

Tabel 3.14
Daftar Pencapaian Efisiensi Realisasi Anggaran Kegiatan BPKAD

Bidang	Total Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
Sekretariat	9 Kegiatan	11.934.525.642	9.353.850.697	78,38%	21,62%
Anggaran	1 Kegiatan	1.616.864.800	1.453.879.386	89,92%	10,08%
Akuntansi dan Perbendaharaan	3 Kegiatan	1.366.701.800	1.265.772.185	92,61%	7,38%
Pengelolaan BMD	1 Kegiatan	1.608.607.650	1.532.627.459	95,28%	4,72%
Belanja Tidak Terduga	1 Kegiatan	10.644.452.302	5.086.375.920	47,78%	52,22%
Belanja Bunga	1 Kegiatan	99.249.400	46.224.179	46,57%	53,43%
JUMLAH BPKAD	14 Kegiatan	27.906.860.344	19.097.246.864	68,43%	31,57%

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat capaian realisasi dan tingkat efisiensi belanja dari tiap bidang cukup baik, hanya saja anggaran Belanja Tidak Terduga yang dimana penggunaannya berdasarkan keadaan darurat, keperluan mendesak, bantuan sosial tidak terencana dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan.

BPKAD Kota Cimahi telah menyusun Perwal dan SOP terkait penggunaan BTT sehingga dapat memudahkan Perangkat Daerah untuk mengajukan penggunaan dana BTT.

3.3.5 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis atas program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja BPKAD selama tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.15

Daftar Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
1.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-
2.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-
3.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-
4.Pengelolaan Barang Milik Daerah	-
5.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kegiatan yang secara langsung berdampak akan pencapaian kinerja diantaranya terdapat di masing-masing bidang seperti kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah yang dimana kegiatan tersebut memiliki 11 sub kegiatan yang saling berkesinambungan dalam pencapaian penetapan APBD tepat waktu yang memiliki target utama dokumen penetapan APBD. Selain itu terdapat 3 kegiatan yaitu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah serta Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah yang terdiri dari 17 sub kegiatan yang didalamnya terkait penunjang utama dari segi penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang memiliki tujuan 1 Dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Dari bidang pengelolaan BMD

terdapat kegiatan pengelolaan BMD yang terdiri dari 7 sub kegiatan yang saling berhubungan dalam perhitungan rasio utilisasi aset di Pemerintah Kota Cimahi.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2025 jenis belanja pada BPKAD Kota Cimahi terdiri belanja operasional, belanja modal belanja transfer dan belanja tidak terduga yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pagu Anggaran total BPKAD Kota Cimahi adalah Rp. 27.906.860.344. Nilai ini meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2024 BPKAD memiliki anggaran sebesar Rp. 29.563.585.657.

3.4.1 Belanja Operasional

Pagu Anggaran Belanja Operasional BPKAD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 16.540.806.042, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.384.019.524 atau 80,92 %. Belanja operasional yang dipergunakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan materil atas pencapaian 4 (empat) indikator sasaran kinerja, dimana realisasi pencapaiannya dapat dilihat sebagaimana tabel rincian berikut ini :

Tabel 3.16

Rincian Program Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja BPKAD
Tahun 2025

No	Program	Anggaran		Rata-Rata Pencapaian %
		Target	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.934.525.642	9.353.850.697	78,38%

2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13.727.268.302	7.852.251.670	57,20%
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.245.066.400	1.891.144.497	84,24%
Jumlah		27.906.860.344	19.097.246.864	68,43%

Dapat dilihat dari tabel diatas dalam Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah capaian realisasi terlihat rendah dikarenakan capaian dari kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dearah dengan sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak terdapat anggaran Belanja Tidak Terduga yang dimana penggunaan nya disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan.

3.4.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang, pada Tahun Anggaran 2025 di BPKAD Kota Cimahi menganggarkan belanja modal (sesuai anggaran perubahan) sebesar Rp. 721.602.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 675.300.700 atau 93,58%. Belanja modal yang dilaksanakan oleh BPKAD meliputi belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya.

3.4.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh APBD Tahun 2025 Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 10.644.452.302, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 5.086.375.920 yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana, penanggulangan sampah dan bantuan sosial tidak terencana.

3.5 Evaluasi Kinerja

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan/target dibutuhkan evaluasi untuk melihat sejauh apa keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Evaluasi kinerja membantu memahami kendala-kendala dalam pencapaian tujuan sehingga dapat memberikan perbaikan dan tujuan dapat tercapai sesuai target.

BPKAD Kota Cimahi pada tahun 2025 melaksanakan evaluasi kinerja per bulan dengan melihat realisasi fisik dan keuangan melalui aplikasi e-reporting. Realisasi fisik dan keuangan pada e-reporting dapat menggambarkan pencapaian realisasi keuangan dan fisik yang dibandingkan dengan perencanaan per bulan yang didasarkan pada anggaran kas pada masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 3.17
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH / BAGIAN : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BULAN DESEMBER TAHUN 2025

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana		
1	KPA :HARJONO, S.Pd., M.M.											
	PPTK :MONA FAUZALIA, S.E.											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.670.399.250,00	100,00	1.670.399.250,00	100,00	95,70	1.529.832.663,00	91,58	91,58	
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58.525.000,00	100,00	58.525.000,00	100,00	81,66	47.390.530,00	80,97	80,97	
		2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88.798.450,00	100,00	88.798.450,00	100,00	88,56	76.090.000,00	85,69	85,69	
		3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.591.800,00	100,00	135.591.800,00	100,00	88,94	119.521.608,00	88,15	88,15	
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.712.000,00	100,00	68.712.000,00	100,00	100,00	64.197.000,00	93,43	93,43	
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.395.000,00	100,00	27.395.000,00	100,00	100,00	26.431.050,00	96,48	96,48	
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.278.000,00	100,00	76.278.000,00	100,00	95,84	71.110.302,00	93,23	93,23	
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43.696.000,00	100,00	43.696.000,00	100,00	96,32	41.728.716,00	95,50	95,50	
		8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.172.000,00	100,00	9.172.000,00	100,00	88,05	7.990.000,00	87,11	87,11	
		9	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.400.000,00	100,00	167.400.000,00	100,00	96,00	159.600.000,00	95,34	95,34	
		10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.262.000,00	100,00	199.262.000,00	100,00	88,80	175.074.500,00	87,86	87,86	Proses pembuatan dokumen untuk ke PBJ yang memerlukan waktu dan proses persetujuan PPK
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	471.000.000,00	100,00	471.000.000,00	100,00	100,00	468.000.000,00	99,36	99,36	
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.700.000,00	100,00	3.700.000,00	100,00	100,00	2.868.948,00	77,54	77,54	
		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.116.000,00	100,00	15.116.000,00	100,00	100,00	14.577.130,00	96,44	96,44	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PPTK : MONA FAUZALIA, S.E.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.670.399.250,00	100,00	1.670.399.250,00	100,00	95,70	1.529.832.663,00	91,58	91,58		
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	256.193.000,00	100,00	256.193.000,00	100,00	99,58	206.750.779,00	80,70	80,70	Kendaraan yang dibayarkan pajaknya merupakan kendaraan pinjam pakai, sehingga repot untuk proses administrasinya ke samsat untuk kendaraan yang jatuh tempo 5 tahun	
		15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.560.000,00	100,00	49.560.000,00	100,00	100,00	48.502.100,00	97,87	97,87		
	PPTK : WENDY ANUGRAH, S.A.B.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	424.254.700,00	100,00	424.254.700,00	100,00	95,86	395.660.988,00	93,26	93,26		
		16	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	51.255.000,00	100,00	51.255.000,00	100,00	88,15	43.904.600,00	85,66	85,66		
		17	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44.857.900,00	100,00	44.857.900,00	100,00	97,47	40.841.945,00	91,05	91,05		
		18	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	36.596.600,00	100,00	36.596.600,00	100,00	97,64	35.535.802,00	97,10	97,10		
		19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	32.411.000,00	100,00	32.411.000,00	100,00	89,04	26.934.081,00	83,10	83,10		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PPTK : WENDY ANUGRAH, S.A.B.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	424.254.700,00	100,00	424.254.700,00	100,00	95,86	395.660.988,00	93,26	93,26		
		20	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.673.400,00	100,00	29.673.400,00	100,00	96,80	25.108.560,00	84,62	84,62	Keterbatasan SDM yang menangani program dan kegiatan pada SubBid Perbendaharaan dan Kas Daerah	
		21	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17.195.500,00	100,00	17.195.500,00	100,00	76,16	12.286.000,00	71,45	71,45	Penyerapan anggaran dilaksanakan pada bulan Desember 2025	
		22	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	212.265.300,00	100,00	212.265.300,00	100,00	99,59	211.050.000,00	99,43	99,43		
	PPTK : YANTI RETNO IRIANI, SSTP.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	601.588.800,00	100,00	601.588.800,00	100,00	89,65	532.623.050,00	88,54	88,54		
		23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.668.800,00	100,00	52.668.800,00	100,00	83,25	41.379.050,00	78,56	78,56		
		24	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	548.920.000,00	100,00	548.920.000,00	100,00	90,26	491.244.000,00	89,49	89,49		
	PPTK : FACHMI NURHAYAT RODIANA, S.E., M.Ak.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.127.416.802,00	100,00	12.127.416.802,00	100,00	97,98	5.861.352.846,00	48,33	48,33		
		25	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	42.237.650,00	100,00	42.237.650,00	100,00	91,70	33.889.051,00	80,23	80,23		
		26	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	324.782.100,00	100,00	324.782.100,00	100,00	92,69	290.455.809,00	89,43	89,43		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PPTK : FACHMI NURHAYAT RODIANA, S.E., M.Ak.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.127.416.802,00	100,00	12.127.416.802,00	100,00	97,98	5.861.352.846,00	48,33	48,33		
		27	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	65.814.400,00	100,00	65.814.400,00	100,00	99,38	65.380.745,00	99,34	99,34		
		28	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	28.241.900,00	100,00	28.241.900,00	100,00	82,75	23.277.237,00	82,42	82,42	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah (Surat Keterangan Lunas), Pengembalian atas Temuan BPK belum seluruhnya terselesaikan masih ada yang melakukan cicilan pelunasan.	Berkoordinasi dengan Inspektorat dan SKPD untuk melakukan follow up terhadap pengembalian temuan BPK
		29	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	55.401.000,00	100,00	55.401.000,00	100,00	99,00	54.810.109,00	98,93	98,93		
		30	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	62.530.100,00	100,00	62.530.100,00	100,00	81,29	48.615.386,00	77,75	77,75		
		31	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	36.069.000,00	100,00	36.069.000,00	100,00	54,68	18.392.319,00	50,99	50,99		
		32	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	19.971.900,00	100,00	19.971.900,00	100,00	69,82	13.933.587,00	69,77	69,77	Keterbatasan Kemampuan SDM di Puskesmas dalam hal Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Melakukan koordinasi dan Pembinaan dengan Bendahara dan Penyusun Laporan Keuangan Puskesmas.

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PPTK : FACHMI NURHAYAT RODIANA, S.E., M.Ak.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.127.416.802,00	100,00	12.127.416.802,00	100,00	97,98	5.861.352.846,00	48,33	48,33		
		33	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	33.284.500,00	100,00	33.284.500,00	100,00	98,54	32.748.244,00	98,39	98,39		
		34	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	99.249.400,00	100,00	99.249.400,00	100,00	47,00	46.224.179,00	46,57	46,57		
		35	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.085.720.302,00	100,00	11.085.720.302,00	100,00	100,00	5.086.375.920,00	45,88	45,88		
		36	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	274.114.550,00	100,00	274.114.550,00	100,00	54,44	147.250.260,00	53,72	53,72	Masih terdapat pemasalah yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPD-RI, yaitu menu aplikasi yang tidak berfungsi dengan baik, error system, dan beberapa input dokumen penatausahaan yang tidak bisa diproses.	Koordinasi dan konsultasi dengan Pusdatin Kemendagri dan melakukan backup data melalui Aplikasi SIPKD Nextgen
	PPTK : EBY SUSANTO, S.A.B., M.Ak.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.662.537.593,00	100,00	9.662.537.592,94	100,00	79,84	6.904.034.401,00	71,45	71,45		
		37	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.642.185.593,00	100,00	9.642.185.592,94	100,00	79,81	6.885.080.401,00	71,41	71,41		
		38	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.340.000,00	100,00	8.340.000,00	100,00	100,00	8.322.000,00	99,78	99,78		
		39	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.012.000,00	100,00	12.012.000,00	100,00	89,51	10.632.000,00	88,51	88,51		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
2	KPA : ANDRI HARDIAN, S.E., M.Ak.												
	PPTK : HARIS SANTIKA, S.Kom., M.T.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	825.552.150,00	100,00	825.552.150,00	100,00	93,39	748.030.424,00	90,61	90,61		
		40	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	293.628.400,00	100,00	293.628.400,00	100,00	97,00	270.650.009,00	92,17	92,17	Tahapan disesuaikan dengan tahapan perencanaan yang sedang berlangsung di Bappelitbangda	
		41	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	327.933.500,00	100,00	327.933.500,00	100,00	93,77	301.826.355,00	92,04	92,04	Tahapan disesuaikan dengan tahapan perencanaan yang sedang berlangsung di Bappelitbangda	
		42	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	10.826.800,00	100,00	10.826.800,00	100,00	37,93	3.981.360,00	36,77	36,77	Tahapan disesuaikan dengan tahapan perencanaan yang sedang berlangsung di Bappelitbangda	
		43	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	11.837.100,00	100,00	11.837.100,00	100,00	63,39	7.358.043,00	62,16	62,16	Tahapan disesuaikan dengan tahapan perencanaan yang sedang berlangsung di Bappelitbangda	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
2	KPA : ANDRI HARDIAN, S.E., M.Ak.												
	PPTK : HARIS SANTIKA, S.Kom., M.T.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	825.552.150,00	100,00	825.552.150,00	100,00	93,39	748.030.424,00	90,61	90,61		
		44	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	95.709.200,00	100,00	95.709.200,00	100,00	89,48	83.516.295,00	87,26	87,26	Tahapan disesuaikan dengan tahapan perencanaan yang sedang berlangsung di Bappelitbangda	
		45	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	85.617.150,00	100,00	85.617.150,00	100,00	95,06	80.698.362,00	94,25	94,25	Tahapan disesuaikan dengan tahapan perencanaan yang sedang berlangsung di Bappelitbangda	
	PPTK : DEKI DJOEMOEDILAGA PERDANA, S.E., M.Ak.												
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	791.312.650,00	100,00	791.312.650,00	100,00	89,22	702.103.962,00	88,73	88,73		
		46	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	140.784.600,00	100,00	140.784.600,00	100,00	89,81	125.341.268,00	89,03	89,03		
		47	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	64.623.000,00	100,00	64.623.000,00	100,00	99,80	64.331.557,00	99,55	99,55		
		48	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	273.302.600,00	100,00	273.302.600,00	100,00	91,50	241.306.845,00	88,29	88,29		
		49	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	54.496.700,00	100,00	54.496.700,00	100,00	93,58	50.898.781,00	93,40	93,40		
		50	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	46.376.400,00	100,00	46.376.400,00	100,00	96,92	44.848.930,00	96,71	96,71		
		51	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	211.729.350,00	100,00	211.729.350,00	100,00	79,86	175.376.581,00	82,83	82,83		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana		
3	KPA : SYAEFUL RACHMAN, S.A.P., M.A.P., M.I.											
	PPTK : IRA TRIANA KUSRIANTINI, S.E., M.Ak.											
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.253.100.000,00	100,00	1.253.100.000,00	100,00	70,69	880.936.165,00	70,30	70,30	
		52	Pengamanan Barang Milik Daerah	556.720.000,00	100,00	556.720.000,00	100,00	87,11	480.809.985,00	86,36	86,36	Mengumpulkan bukti riwayat perolehan (alas hak) dan penguasaan lahan oleh pihak lain tanpa ijin pemerintah
		53	Penilaian Barang Milik Daerah	186.600.000,00	100,00	186.600.000,00	100,00	94,74	176.591.580,00	94,64	94,64	Taksiran luasan lahan yang akan dinilai/apraisal
		54	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	509.780.000,00	100,00	509.780.000,00	100,00	43,95	223.534.600,00	43,85	43,85	Kurang lengkapnya data awal dan tingkat pengamanan dari penggunaan barang, sehingga menghambat proses pendataan barang baik dalam proses penghapusan, pemanfaatan ataupun pemindahtanganan

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
3	KPA : SYAEFUL RACHMAN, S.A.P., M.A.P., M.I.												
	PPTK : EVI YANTI, S.Si., M.E.												
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	829.087.550,00	100,00	829.087.550,00	100,00	89,97	726.296.712,00	87,60	87,60		
		55	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	81.806.000,00	100,00	81.806.000,00	100,00	89,60	72.881.200,00	89,09	89,09	Penggunaan aplikasi sentuh branda belum optimal dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD	Memberikan layanan konsultasi kepada operator pada pengguna barang/SKPD
		56	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	25.592.000,00	100,00	25.592.000,00	100,00	83,52	21.405.800,00	83,64	83,64		
		57	Penatausahaan Barang Milik Daerah	479.004.150,00	100,00	479.004.150,00	100,00	94,76	436.413.212,00	91,11	91,11	Penggunaan aplikasi pengelolaan BMD belum optimal	Memberikan layanan konsultasi kepada operator
		58	Inventarisasi Barang Milik Daerah	35.221.300,00	100,00	35.221.300,00	100,00	70,58	24.681.300,00	70,07	70,07		
		59	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	24.500.200,00	100,00	24.500.200,00	100,00	56,55	13.750.200,00	56,12	56,12		
		60	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	41.600.800,00	100,00	41.600.800,00	100,00	42,86	17.450.800,00	41,95	41,95		
		61	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	141.363.100,00	100,00	141.363.100,00	100,00	99,60	139.714.200,00	98,83	98,83		
	PPTK : RONA MUKHTAR SHIDIQIE, S.T.												
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	162.878.850,00	100,00	162.878.850,00	100,00	94,86	147.679.900,00	90,67	90,67		
		62	Penyusunan Standar Harga	162.878.850,00	100,00	162.878.850,00	100,00	94,86	147.679.900,00	90,67	90,67		
	Total/Rata-rata			28.348.128.345,00	100,00	28.348.128.344,94	100,00	89,62	18.428.551.111,00	65,01	65,01		

Evaluasi kinerja di BPKAD juga dilaksanakan per triwulan didasarkan kepada akumulasi realisasi fisik dan keuangan serta capaian target per triwulan. Capaian per triwulan juga melihat sejauh progres pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Evaluasi per triwulan dilaksanakan bersamaan dengan rapat internal BPKAD, sekaligus membahas isu-isu ataupun permasalahan lain diluar capaian target kinerja. Selain dalam rapat internal, Bappelitbangda juga melaksanakan monev capaian kinerja dengan dasar yang sama yaitu melihat realisasi fisik dan keuangan hanya saja dengan secara rinci melihat progres pelaksanaan kegiatan berikut kendala yang menghambat.

Selain melihat realisasi fisik dan keuangan, monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan dengan melihat rencana aksi dan rencana kerja yang telah dibuat dan direncanakan dalam tahun 2024, serta pada akhir triwulan dibandingkan kepada capaian akhir renstra.

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kota Cimahi Tahun 2025 ini, dapat kami simpulkan bahwa BPKAD Kota Cimahi telah memperlihatkan pencapaian kinerja sebesar 111,38 %. terhadap dua sasaran strategis yaitu optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dan Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja penetapan APBD secara tepat waktu, presentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan rasio utilisasi aset terhadap total aset daerah serta nilai evaluasi refirmasi birokrasi, untuk mendukung pelaksanaan Misi Wali Kota Cimahi yang kedua yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama Tahun Anggaran 2025 dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja BPKAD Kota Cimahi, maka terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang yang di antaranya :

1. Pencapaian Peningkatan Rasio Utilisasi Aset;
2. Pencapaian Indeks Pengelolaan Aset;
3. Mempertahankan Laporan Kinerja BPKAD Nilai “A”;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
5. Penambahan kebijakan-kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
6. *Adaptive* terhadap perubahan kondisi dan peraturan serta perundang-undangan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

1. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pemanfaatan aset;
2. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan dan SIPD;
3. Mengikuti pelatihan, pembinaan dan konsultasi bagi ASN BPKAD Kota Cimahi;
4. Menyusun analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang ada pada BPKAD Kota Cimahi sehingga dapat memetakan kebutuhan pegawai;
5. Mapping tugas pokok dan fungsi diperkuat penyusunan SOP;
6. Koordinasi secara intensif kepada internal maupun eksternal.

DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian	Link Google Drive
1	SOP Penyusunan Renja dan Renstra	https://bit.ly/3DaC9KE
2	RPJPD Kota Cimahi 2005-2025	
3	RPD Kota Cimahi 2023-2026	
4	Renstra BPKAD Kota Cimahi 2023-2026	
5	Renja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2025	
6	Renja Perubahan BPKAD Kota Cimahi Tahun 2025	
7	Rencana Aksi 2025	
8	RKA Perubahan dan DPA Perubahan 2025	
9	Screenshoot Renja, Renja Perubahan dan LKIP di ESR	
10	Pohon Kinerja 2025	
11	Cascading Renstra 2023-2026	
12	Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2025	
13	SKP Pegawai Tahun 2025	
14	Monev Per Triwulan Tahun 2025	
15	Monev Rencana Aksi Tahun 2025	
16	LKIP Tahun 2025	
17	SK Tim LKIP 2025	
18	SK IKU, SK Renja	
19	SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	
20	SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja	

21	SOP Evaluasi Kinerja Internal	
22	Perwal TPP	
23	SP Mutasi,Rotasi dan Mutasi	
24	Reviu LKIP 2025	
25	Sertifikat ASN Mengikuti Diklat SAKIP	
27	LHE AKIP Tahun 2024	
28	TL LHE AKIP Tahun 2024	